



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ASLI NASUTION**
2. Jabatan : **HAKIM**
3. NHK : **60352**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. **1.368.000.000**

1. Tanah Seluas 100 m2 di KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 31.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 129 m2/36 m2 di KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
3. Tanah Seluas 399 m2 di BUNGO, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
4. Tanah Seluas 12400 m2 di KOTA MUARA TEBO , HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
5. Tanah Seluas 21060 m2 di KOTA MUARA TEBO , HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
6. Tanah Seluas 10000 m2 di ASAHAN, WARISAN Rp. 270.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 172 m2/36 m2 di PASAMAN, HASIL SENDIRI Rp. 127.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 128 m2/36 m2 di KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 410.000.000
9. Tanah Seluas 12180 m2 di KOTA MUARA TEBO , HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. **26.000.000**

1. MOTOR, YAMAHA VEGA R SEPEDA MOTOR Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000
3. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000



4. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI
Rp. 8.000.000

5. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI
Rp. 5.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 3.700.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 14.815.270

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 1.412.515.270

III. HUTANG Rp. 170.345.004

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.242.170.266

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.